



Para pendukung presiden terpilih Xiomara Castro memasuki kantor Kongres Nasional setelah upacara pelantikan ketua baru Kongres di Kota Tegucigalpa, Honduras, beberapa waktu lalu. Penunjukkan ketua baru Kongres itu menuai kontroversi dan memicu protes dari kubu Partai Libre.

Dari Ibu Negara Jadi Presiden Perempuan Pertama

TEGUCIGALPA - Ibu negara Xiomara Castro telah terpilih menjadi presiden perempuan pertama Honduras. Melalui posisinya itu, dia berencana melakukan perubahan radikal untuk mengeluarkan Honduras dari pandemi, korupsi, dan kemiskinan.

Xiomara telah memenangi pemilihan umum (pemilu) pada November tahun lalu. Dia menjalani pelantikan pada Kamis (27/1) waktu lokal atau dini hari tadi. Politikus Sosialis Demokratis itu unggul 14 poin dari pesaingnya, Nasry Asfura, mantan Wali Kota Tegucigalpa dan kandidat pemimpin Partai Nasional. Dengan meraih perolehan suara sebanyak 51% atau 1,7 juta suara, Xiomara mencatat rekor baru di dalam sejarah Honduras. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat. Selama kampanye, dia berjanji memerangi korupsi, meloloskan Undang-Undang Aborsi, dan memberantas kemiskinan. Namun, adanya perpecahan di dalam tubuh Partai Libre kemungkinan menghambat agenda tersebut. Pada akhir pekan lalu, sekelompok anggota parlemen dari Partai Libre memprotes penunjukan ketua

kongres yang dilakukan Xiomara karena dianggap timpang dan merugikan partainya sendiri. Kekecewaan besar yang menyempit sebagian politikus Partai Libre setelah dia diangkat menunjukkan kekuatan dukungan terhadap program Xiomara. Para ahli menilai, Xiomara akan menghadapi situasi yang sulit. Namun, dia diyakini menyadari konsekuensi tersebut sebelum menetapkan ketua kongres. Di luar itu, Xiomara akan menghadapi tantangan lainnya dalam melakukan perubahan besar. Sesuai data Bank Dunia, Honduras termasuk salah satu negara termiskin di Amerika Latin dan Karibia. Angka kemiskinannya dilaporkan meningkat dari sekitar 59,3% pada 2019 menjadi 70% pada 2020. Permasalahan ekonomi ini menjadi salah satu penyebab utamanya banyak warga Honduras yang bermigrasi ke Ame-



Presiden terpilih Honduras Xiomara Castro memberikan pidato kepada para pendukung di luar kongres Honduras, Tegucigalpa, Honduras, beberapa waktu lalu.

rika Utara setiap tahun. Pejabat imigrasi Guatemala mengatakan sedikitnya 8.000 imigran asal Honduras telah memasuki Guatemala hanya dalam dua hari pada bulan ini. Janji Xiomara memberantas kemiskinan tidak hanya disambut warga Honduras, tetapi juga Pemerintah Amerika Serikat (AS). Wakil Presiden AS Kamala Harris dijadwalkan menghadiri pelantikannya. Hal ini menunjukkan Pemerintahan AS melegitimasi pemerintahan Xiomara yang ambisius. Xiomara juga berjanji melindungi hak-hak perempuan, terutama dalam isu reproduksi. Xiomara kemudian menca-

lonkan diri menjadi presiden pada Pemilu 2013 dan 2017, tetapi gagal. Sama seperti negara lainnya, politikus perempuan kebanyakan kalah bersaing dengan politikus laki-laki dalam kontestasi politik. Hanya, Xiomara tidak pernah putus asa dan terus berjuang. Sesuai laporan di situs web Partai Libre, Xiomara lahir di Tegucigalpa. Dia sangat mendedikasikan hidupnya untuk keluarganya sebelum menikah dengan politikus Manuel Zelaya di usia 19 tahun. Sembari merawat dan membesarkan empat anaknya, Xiomara juga sibuk mengelola bisnis. Sekalipun Zelaya naik menjadi presiden pada 2006, Xiomara tidak pernah memiliki ambisi politik. Namun, dia selalu bersikap suportif. Sosiolog National Autonomous University of Honduras (UNAH) Julio Raudales mengatakan, Xiomara telah berperan aktif dalam program sosial dan pendidikan. Bagaimana pun, peristiwa tidak terduga terjadi pada 2009. Zelaya telah diculik dari rumahnya atas perintah perwira militer. Pemerintah Honduras yang berencana melakukan reformasi konstitusi agar presiden dapat menjabat dua periode dikudeta. Zelaya kemudian diasingkan ke Costa Rica. **muhsamil**

Kamboja Bujuk Myanmar Izinkan ASEAN Bertemu Oposisi

PHNOM PENH - Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen membujuk pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, untuk membuka pintu bagi petugas bantuan kemanusiaan dan utusan khusus Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) saat mereka melakukan kunjungan. Sebagai ketua baru ASEAN, Hun Sen telah menyoroti krisis Myanmar sebagai bagian dari agenda utamanya. Melalui sambungan *video call*, Hun Sen telah meminta Hlaing untuk menaati lima poin konsensus yang disepakati di Jakarta pada April 2021. Hal ini akan menjadi langkah awal dan besar bagi Myanmar. Sejauh ini upaya perdamaian di Myanmar sangat sulit karena junta militer dan pihak oposisi tidak mampu menaati lima poin konsensus ASEAN. Pihak militer tetap melakukan kekerasan dengan melakukan pemberantasan oposisi di perkampungan, sedangkan oposisi rutin melakukan aksi terorisme. Dengan kondisi seperti itu, junta militer dan pihak oposisi tidak mampu membangun dia-

log perdamaian yang rencananya difasilitasi dan dimediasi ASEAN. Junta militer Myanmar juga melarang utusan khusus ASEAN bertemu dengan perwakilan oposisi, termasuk politisi lokal Aung San Suu Kyi. Selain itu, ASEAN tidak dapat menyalurkan bantuan kemanusiaan karena diblokade junta militer, khususnya menuju wilayah yang dianggap basis oposisi. Tahun ini Hun Sen berharap junta militer dan kelompok oposisi Myanmar akan terbuka untuk menekan perdamaian demi membangun kembali Myanmar. Menteri Atase Delegasi Kamboja Kao Kim Hourn mengatakan Hun Sen bertekad kuat untuk memuluskan resolusi perdamaian di Myanmar. Sebab, isu ini menjadi tantangan terbesar ASEAN. Namun, dia menyadari tugas ini tidak mudah dan memerlukan waktu. Kondisi di lapangan juga bersifat dinamis. “Hun Sen meminta Min Aung Hlaing untuk menerima dan memfasilitasi utusan khusus ASEAN saat melakukan kunjungan dimasa depan,” ujar Hourn. “Selain itu, beliau

mengimbau semua pihak, termasuk pemerintah Myanmar, untuk menghentikan kekerasan dan segera melakukan gencatan senjata.” Pemerintah Kamboja tidak membeberkan bagaimana tanggapan Hlaing terkait desakan tersebut. Sampai berita ini diturunkan, pemerintah Myanmar juga tidak memberikan respons. Sebagian ahli menilai Hlaing sulit untuk mengikuti arahan ASEAN karena oposisi masih melakukan perlawanan. Sebelumnya, Hun Sen juga

prihatinan ASEAN, terkait kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang memburuk di Myanmar. **muhsamil**

DOCTORMIGRANT

Tingkatkan Akses Kesehatan PMI

JAKARTA - Seiring dengan mewabahnya virus korona Covid-19 ke seluruh dunia sejak 2020 silam, upaya untuk menjaga kesehatan tubuh menjadi sangat penting. Sayangnya, sebagian besar pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengadu nasib ke luar negeri sering terkendala bahasa saat jatuh sakit. Pekan ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, Malaysia, juga memulangkan sedikitnya 10 PMI karena menderita penyakit serius, mulai dari tuberkulosis hingga kanker. PMI asal Biltar, Jawa Timur, Halimah Ahmad juga memilih untuk pulang dan menjalani pengobatan di Tanah Air. Para PMI, terlepas di Asia ataupun Afrika, rentan mengalami sakit berkepanjangan akibat kesulitan mengakses layanan kesehatan di luar negeri. Mereka biasanya terkendala perbedaan budaya dan bahasa. Dengan begitu, tak heran jika PMI sangat kebingungan untuk melakukan pengobatan. Demi menjembatani PMI di seluruh dunia dengan para dokter di Indonesia, Komisaris Utama Indonesia Infrastructure Investama Verolijondo Jamal memprakarsai platform digital DoctorMigrant. Aplikasi *telemedicine* tersebut diharapkan dapat membantu PMI untuk mendapatkan layanan kesehatan yang praktis. Jamal mengatakan kesehatan kini menjadi syarat mutlak bagi para PMI untuk dapat terus bekerja di luar negeri menyusul mewabahnya Covid-19. Belakangan ini, beberapa PMI juga dikarantina karena positif Covid-19 setelah pulang dari negara tetangga. Tapi, sebagian tidak menunjukkan gejala. “PMI perlu dan layak mendapatkan akses layanan kesehatan yang efektif dan efisien saat bekerja di luar negeri,” ujar Jamal, di Jakarta, beberapa waktu lalu. “Tantangan ini mendorong kami untuk menciptakan aplikasi kesehatan digital yang dapat menjangkau mereka di mana pun mereka berada.” Jamal menyebutkan DoctorMigrant dapat diakses para PMI selama mereka memiliki

smartphone dan jaringan internet. Dengan menggandeng beberapa ahli kesehatan dan dokter, DoctorMigrant diharapkan akan dapat memudahkan PMI melakukan konsultasi kesehatan menggunakan bahasa Indonesia. Secara teknis, para PMI dapat berkonsultasi menggunakan pesan percakapan atau *video call*. Mereka dapat memberikan gangguan kesehatan yang dialami dan menerima saran atau resep obat dari dokter yang ditulis berdasarkan standar internasional. Resep itu kemudian dapat dibawa ke klinik setempat. “Platform digital ini diharapkan dapat memudahkan para PMI memperoleh akses layanan kesehatan kapan pun dan di mana pun mereka berada, terutama bagi mereka yang terkendala bahasa,” kata Jamal. “Platform ini sangat mudah diakses, praktis, interaktif, dan memiliki layanan yang transparan.” Saat ini layanan DoctorMigrant masih belum dapat diakses secara penuh karena aplikasi tersebut masih dalam tahap awal pengembangan dan baru akan diluncurkan pada Februari mendatang di Indonesia. Namun, para pengguna dapat mengunduh versi *early access* di Playstore untuk melihat fitur nya. Pendiri DoctorMigrant yang lain, Rima Dewi Anggraeni, mengatakan peningkatan perlindungan kesehatan PMI merupakan bagian dari amanat Undang-Undang (UU) yang perlu didukung masyarakat. Dia menilai saat ini kesehatan para PMI telah dipertaruhkan karena mereka terkendala bahasa. “Idenimunculas dasar keprihatinan kami terhadap kondisi kesehatan PMI yang kesulitan mengakses layanan kesehatan di luar negeri, baik akibat perbedaan bahasa maupun identitas yang tidak lengkap,” kata Dewi. “Melalui platform *telemedicine* ini, sekat-sekat tersebut diharapkan akan dapat hilang.” **muhsamil**



PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN PT Pasundan Resources

Dengan ini diumumkan kepada pihak – pihak yang berkepentingan dengan Perseroan dan/atau Kreditor bahwa akan dilakukan pengambilalihan yang berakibat beralihnya pengendalian atas PT Pasundan Resources yang berkedudukan di Jakarta Selatan (Perseroan). Pengumuman ini merujuk kepada Pasal 127 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Untuk itu apabila ada pihak – pihak yang keberatan, mohon untuk dapat menghubungi Direksi di Kantor Perseroan.

Demikian pengumuman ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 28 Januari 2022
Direksi Perseroan
PT Pasundan Resources

PENGUMUMAN PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEMENTARA TERHADAP PT. LEKONG dan PEMBERHANTUAN RAPAT KREDITUR PERTAMA			
menunjuk ketentuan Pasal 226 ayat (1) Jo. Pasal 269 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan ini diumumkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 106/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, atas permohonan PKPU yang diajukan oleh Solichin Dkk. yang diwakili oleh kuasa hukumnya dari Kantor LBI Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPMI KSPI) yang beralamat di: Ji. Simo Pomanah II, Simo Mulyo, Sukomanunggal, Kota Surabaya.			
Dengan amar putusan sebagai berikut:			
M E N G A D I L I :			
1. Mengabalkan Mengabalkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari para Pemohon PKPU tersebut;			
2. Menetapkan Temohon PKPU PT. LEKONG yang berkedudukan di Pasuruan, beralamat di: Jalan Sumber Nusantara Desa. Pucangan, Kecamatan Purosuran, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 Hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;			
3. Menunjuk Sudar, S.H., M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas;			
4. Menyuruh dan mengangkat Saudara:			
- Mallanay, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Perijinan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-206 AH.04.03-2021 tanggal 23 Maret 2021, ber Kantor di: Jl. Tanah Kusir III RT/RW 002/009, Kelurahan Luma Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; dan			
- Anggrain Rahmawati, S.H., selaku Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-184 AH.04.03-2020 tanggal 20 Februari 2020, ber Kantor di: NRI Law Firm Komplek Gallery Niaga, Jl. Haji Nawi Raya No.9N, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan.			
Sebagai Pengurus dalam perkara PKPU diatas;			
5. Menanggihkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;			
Kemudian, berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas 106/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., tanggal 27 Januari 2022, Hakim Pengawas telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:			
No.	Kegiatan	Hari, Tanggal & Waktu	Tempat
1	Rapat Kreditor Pertama	Senin, 07 Februari 2022 Pukul : 10.00 WIB	Pengadilan Niaga Surabaya Jl. Arjuno No. 16-18, Sawahan, Surabaya
2	Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditor	Jumat, 18 Februari 2022 Pukul : 15.00 WIB	Kantor Tim Pengurus PT. Lekong (dalam PKPU): NR LAW FIRM Gallery Niaga, Jl. Haji Nawi Raya No. 9N, Jakarta Selatan
3	Rapat Pencocokan Piutang Kreditor	Selasa, 01 Maret 2022 Pukul : 10.00 WIB	Pengadilan Niaga Surabaya Jl. Arjuno No. 16-18, Sawahan, Surabaya
4	Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian	Rabu, 09 Maret 2022 Pukul : 10.00 WIB	Pengadilan Niaga Surabaya Jl. Arjuno No. 16-18, Sawahan, Surabaya
5	Sidang / Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim	Jumat, 11 Maret 2022 Pukul : 10.00 WIB	Pengadilan Niaga Surabaya Jl. Arjuno No. 16-18, Sawahan, Surabaya
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang Kreditor Pajak dan Para Kreditor untuk segera mengajukan tagihan dengan disertai bukti pendukungnya yang sah pada setiap hari jam kerja (Senin s.d Jumat) pukul 09.00 WIB s.d 15.00 WIB, sebelum batas akhir pengajuan tagihan kepada Tim Pengurus PT. Lekong (dalam PKPU) yang beralamat Kantor di: NR Law Firm, Gallery Niaga, Jalan Haji Nawi Raya No.9N, Jakarta Selatan, Telp. (021) 720 1475 atau email kepada: pengurus.pku.lekong@gmail.com.			
Demikian pengumuman ini berlaku sebagai undangan/panggilan bagi Debitor PKPU, Kantor Pajak, Para Kreditor, dan Pihak lain yang berkepentingan.			
28 Januari 2022 Tim Pengurus PKPU PT. Lekong (dalam PKPU) TTD			
Anggrain Rahmawati, S.H. Mallanay, S.H.			

**PENGUMUMAN
TENTANG PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA
TERHADAP PT WASKITA BETON PRECAST TBK (DALAM PKPU)
DAN PANGILAN/UNDANGAN PERSIDANGAN/RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM**

Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (4) Jo. Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan ini Tim Pengurus PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) mengumumkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2022 yang amarnya berbunyi, antara lain :

M E N G A D I L I :

- Mengabalkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PARA PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU/PT WASKITA BETON PRECAST, Tbk., Suatu Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Teraskita Lt 3&3A, Jl. MT Haryono Kav. No. 10 A, Jakarta Timur 13340 untuk seluruhnya;
- Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap TERMOHON PKPU/PT WASKITA BETON PRECAST, Tbk., selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara A quo diucapkan;
- Menunjuk Sdr. YUSUF PRANOWO, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/PT WASKITA BETON PRECAST, Tbk.;
- Menunjuk dan mengangkat:
 - Saudara ALLOVA HERLING MENGKO, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran No. AHU-83.03.2018 tertanggal 23 Januari 2018; beralamat di: RDTX Tower Lantai 12, Zona F Suite 1201, Jalan Prof Dr. Sartio Kav. EIV No. 6 Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12940;
 - Saudara DAUD NAPIUTUPULU, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran No. AHU-643 AH.04.03-2021, tertanggal 29 Desember 2021, beralamat di Komplek Perumahan Harapan Bara Regency, Jalan Gardena 83/20 RT 004/RW 014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Jawa Barat 17133;
 - Saudari JESICA NOVIA PUSPITANINGRUM, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran No. AHU-87.AH.04.03-2019, tertanggal 2 April 2019, beralamat Kantor di: No. Menara Rajawali Lt. 12, Mega Kuningan, Lot #5, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Untuk bertindak selaku Tim PENGURUS untuk mengurus harta Termohon PKPU dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/PT WASKITA BETON PRECAST, Tbk dan/atau mengangkat Kurator dalam hal Termohon PKPU dinyatakan Pailit;
- Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, Pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26 Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Memerintahkan Tim PENGURUS untuk memanggil TERMOHON PKPU/PT WASKITA BETON PRECAST, Tbk dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
- Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya;
- Menanggihkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan selesai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 27 Januari 2022 (“Penetapan”) telah ditetapkan bahwa : Persidangan dalam rangka Rapat Permusyawaratan Hakim akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, jam 09.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, Jakarta Pusat. Dalam Penetapan tersebut telah ditentukan pula hal-hal sebagai berikut :

- Rapat Kreditor Pertama : Kamis, 03 Februari 2022 jam 09.00 WIB
- Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditor dan Pajak : Jum’at, 11 Februari 2022 jam 17.00 WIB
- Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang : Jum’at, 25 Februari 2022 jam 09.00 WIB
- Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian : Jum’at, 04 Maret 2022 jam 09.00 WIB
- Rapat Voting/Pengumuman Suara : Senin, 07 Maret 2022 jam 09.00 WIB

Dengan memperhatikan situasi Pandemi Covid-19 dan berkaitan dengan pengajuan tagihan para Kreditor, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19, maka kami menghimbau kepada para Kreditor untuk segera mengajukan scan dokumen-dokumen tagihan secara digital ke alamat e-mail Tim Pengurus PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) sebagai berikut:

timpenguruswaskitabeton@pkpudandanpailit.com

Tim Pengurus akan mengirim formulir tagihan untuk diisi oleh Kreditor. Selanjutnya, Kreditor melengkapi formulir tagihan dan mengirim via email kepada Tim Pengurus. Kreditor diminta membawa salinan/fotocopy bukti tagihan serta menunjuk aslinya kepada Tim Pengurus pada waktu yang ditentukan kemudian.

Apabila ada pertanyaan seputar pengajuan tagihan, kami membuka layanan pertemuan virtual dengan terlebih dahulu mengisi form dengan scan QR code berikut:

SCAN ME
KANTOR TIM PENGURUS
CHAMBERS - Menara Rajawali Lantai 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Telp. +62 2150992300-037W,

Demikian pengumuman ini berlaku pula sebagai panggilan/undangan bagi Debitor, Para Kreditor dan Pihak Lain yang berkepentingan.

Jakarta, 28 Januari 2022
tdt
TIM PENGURUS PT WASKITA BETON PRECAST TBK (DALAM PKPU)